

JURNAL POLITIQUE

**Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya**

Vol. 2 No. 2 Juli 2022

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BERPENDIDIKAN SARJANA DAN BUKAN SARJANA DI MADURA

Holilah, Muchammad Ismail

Penulis adalah Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
holilah@uinsby.ac.id, Muhammad.ismail@uinsby.ac.id

Abstrak

Studi ini ingin melengkapi studi sebelumnya tentang gaya kepemimpinan kepala desa dari perspektif pandangan masyarakat, khususnya tentang pandangan masyarakat tentang gaya kepemimpinan kepala desa sarjana dan bukan sarjana dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Apakah terdapat perbedaan gaya kepemimpinan kepala desa yang berpendidikan sarjana dengan yang bukan sarjana dalam menyelenggarakan pemerintahan dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perbedaan gaya kepemimpinan kepala desa tersebut. Studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Lokasi penelitian di empat desa kecamatan Tanjungbudi Kabupaten Bangkalan, Desa Paseseh dan Desa Bumianyar mewakili kepala desa berpendidikan sarjana dan Desa Telaga Biru dan Tambak Pocok mewakili kepala desa tidak berpendidikan sarjana. Informan penelitian adalah warga masing-masing desa dan beberapa tokoh diantaranya tokoh pemerintah, masyarakat, kyai, perempuan dan blater. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan, teori Gaya Kepemimpinan dari Harbani Pasolong. Penelitian ini ditemukan pertama, gaya kepemimpinan kepala desa yang berpendidikan sarjana adalah demokratis dan otoriter. Gaya kepemimpinan kepala desa bukan sarjana, kepala desa Telaga Biru menurut warganya demokratis, sedangkan kepala desa Tambak pocok dinilai memiliki gaya kepemimpinan demokratis dan otoriter. Kedua, Faktor yang melatar belakangi gaya kepemimpinan kepala desa adalah sesuai teori sifat kepemimpinan yaitu karakter kepala desa dan lingkungan kepala desa dibesarkan, sedangkan strata pendidikan tidak cukup mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala desa.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Kepala Desa dan Tingkat Pendidikan

Pendahuluan

Seorang pemimpin menjadi pusat dari segala aktivitas dan perubahan dalam suatu kelompok. Ia adalah kombinasi dari bakat khusus dan karakteristik individu yang memiliki

kemampuan untuk mendelegasikan tugas secara efektif, mendorong individu lain untuk mencapai tujuan bersama (M. Alfian Alfian 2009, 65).

Dalam konteks desa, kepala desa menjadi pemimpin tertinggi di tingkat desa. Perannya sangat signifikan dalam menjalankan pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin desa, tetapi juga merupakan elit lokal yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Kehormatan yang diberikan masyarakat kepada kepala desa sering membuatnya menjadi panutan bagi mereka, mengingat besarnya pengaruh kedudukannya terhadap masyarakat.

Kepala desa (istilah Madura *Klebun*) merupakan pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Bagus and Sasmito 2021b). Semua urusan masyarakat selalu dikonsultasikan kepada kepala desa, misalnya pernikahan, kecelakaan, konflik, kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi dan lainnya. Sehingga interaksi antara kepala desa sebagai pemimpin desa dan masyarakat desa sangat erat dalam sehari-hari. Dengan demikian, tidak jarang Masyarakat Madura merasa sungkan terhadap kepala desa apabila tidak sejalan dengan kepala desanya. Misalnya pemilihan bupati, gubernur, caleg dan presiden.

Lebih jauh lagi, kepala desa di Madura hampir semua memang putra daerah yang lahir di desa setempat. Secara sosiologis kepala desa mempunyai kekerabatan yang sangat banyak di desa yang ia pimpin. Seorang kepala desa di Madura juga mempunyai pemahaman budaya di desa yang dia pimpin karena latar belakang pengalaman tidak lepas dari ketokohan sebagai tokoh *blater*, baik dia sendiri sebagai blater, putra blater atau keponakan dari tokoh blater (Holilah 2014).

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satu syarat calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Di Madura, khususnya di kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan kepala desa terpilih, apabila dilihat berdasarkan strata Pendidikan Sarjana dan bukan sarjana (SMA/sederajat), dari 14 kepala desa memiliki jumlah latar belakang Pendidikan berimbang, 7 kepala desa berpendidikan sarjana dan 7 bukan sarjana (lulusan SMA/sederajat)(BPS Kabupaten Bangkalan 2018).

Gaya kepemimpinan, menurut James A.F. Stoner (James A.F. Stoner 1993), dapat diartikan sebagai berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mempengaruhi para pekerja. Stoner mengategorikan gaya kepemimpinan menjadi dua, yaitu:

1. Gaya berorientasi pada tugas: Pemimpin cenderung mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan.
2. Gaya berorientasi pada hubungan: Pemimpin lebih menekankan pada motivasi daripada mengendalikan bawahan. Gaya ini ditandai dengan menjalin hubungan bersahabat, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai. Mereka seringkali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Pasolong (2007), terdapat tiga gaya kepemimpinan, yaitu otokratik, demokratis, dan laissez-faire (Pasolong 2019)..

Banyak penelitian telah dilakukan tentang gaya kepemimpinan kepala desa, antara lain: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Al-Qadri 2024); Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Solong, Sartika, and Dzulqarnain 2022); Praksis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Utaminingsih, Wike, and Riniwati 2020), Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Bagus and Sasmito 2021a), Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik (Putri, Febriyanti, and Amaliatulwalidain 2022).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas diketahui bahwa belum ada studi yang memeliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa berdasarkan latar belakang Pendidikan sarjana dan bukan sarjana dari perspektif Masyarakat. Oleh karena itu studi ini ingin melengkapi studi sebelumnya dan menarik untuk diteliti. Khususnya tentang bagaimana “Pandangan Masyarakat Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Berpendidikan Tinggi Dan Tidak Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan)”

Landasan Teori

Kepemimpinan

"Kepemimpinan (Leadership) dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang, yakni pemimpin atau leader, untuk memengaruhi perilaku orang lain yang menjadi bawahannya atau

pengikutnya. Individu tersebut akan bersikap sesuai dengan kehendak pemimpin. Terkadang, konsep kepemimpinan dibedakan menjadi kedudukan atau posisi formal serta sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat 1976)."

"Kepemimpinan melibatkan hubungan dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Dinamika kepemimpinan muncul dan berkembang melalui interaksi alami antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin, yang melibatkan relasi interpersonal. Kepemimpinan dapat beroperasi dengan didasarkan pada kekuasaan pemimpin untuk membimbing, mempengaruhi, dan menggerakkan individu-individu tersebut guna mencapai tujuan tertentu (Kartini Kartono 2013a)."

"Secara umum, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan menggunakan pengaruhnya untuk memotivasi dan membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan tidak hanya tentang memiliki otoritas formal, tetapi juga melibatkan memberikan contoh kepada para pengikutnya agar mereka dapat mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi."

Kriteria Pemimpin

Pemimpin yang sukses seharusnya memenuhi beberapa kriteria, yang bergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, baik itu berkaitan dengan sifat kepribadiannya, ketrampilannya, bakatnya, sifat-sifatnya, atau kewenangan yang dimilikinya. Evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas perilakunya, yang digunakan sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya.

Pemimpin yang berhasil memiliki karakteristik tertentu, seperti kemampuan beradaptasi dengan situasi, kepekaan terhadap lingkungan sosial, ambisi dan orientasi pada hasil, ketegasan, kemampuan bekerja sama, keahlian meyakinkan, kemandirian, kemampuan mempengaruhi orang lain, energik, tekun, percaya diri, tahan stres, dan tanggung jawab. Keterampilan yang esensial bagi seorang pemimpin mencakup kecerdasan, kemampuan berpikir konseptual, kreativitas, diplomasi, taktik, keterampilan berbahasa, pengetahuan tentang tugas kelompok, kemampuan mengorganisir, memengaruhi, meyakinkan, dan keterampilan lainnya ((Veithzal Rivai 2006).

Sifat-sifat yang diharapkan dari seorang pemimpin tidak selalu seragam di setiap masyarakat, meskipun terdapat kesamaan di beberapa tempat. Di masyarakat Indonesia,

contohnya, pemimpin diharapkan memiliki sifat-sifat seperti memberikan kesenangan, mau bekerja, patuh, dan memberikan semangat kepada bawahannya (Soerjono Soekanto 1993).

Fungsi Kepemimpinan

Peran pemimpin dalam suatu kelompok atau desa memiliki signifikansi yang besar, karena mereka menjadi penentu dan pembimbing bagi masyarakat yang mereka pimpin. Fungsi kepemimpinan, baik pada pemimpin laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya mencakup tugas memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberikan motivasi dalam pekerjaan, mengelola organisasi, menjalankan komunikasi efektif, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan mengarahkan pengikutnya menuju tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan waktu dan perencanaan yang telah disepakati (Kartini Kartono 2013b).

Fungsi pemimpin dalam suatu kelompok atau dalam suatu desa memiliki peranan yang sangat besar, karena pemimpin menjadi penentu dan pembimbing masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin laki-laki dan perempuan memiliki fungsi kepemimpinan yang sama. Fungsi kepemimpinan pada dasarnya ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan memotivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalani jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan (Kartini Kartono 2013b).

Seorang pemimpin yang baik diharapkan dapat memahami segala aspek perilaku kepemimpinan dan mengetahui kapan fungsi kepemimpinan diperlukan. Pemimpin yang baik perlu memiliki tiga macam kesadaran, yaitu: *pertama*, sadar kapan pemimpin itu diperlukan dalam situasi tertentu, *kedua*, sadar akan perubahan tata nilai baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dalam masyarakat, *ketiga*, sadar betapa pentingnya kepemimpinan yang efektif yang mampu mengerakkan orang lain bekerja seefektif mungkin (Veithzal Rivai 2006).

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya kepemimpinan Menurut Stoner 1996, adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja (J.A.F. Stoner 1993, 165).

Stoner membagi gaya kepemimpinan menjadi dua yaitu 1) Gaya yang berorientasi pada tugas mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. 2) Gaya yang berorientasi lebih menekankan pada memotivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan bersahabat, saling percaya dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Pasolong setidaknya ada tiga gaya kepemimpinan yaitu otokratik, demoktarik dan *laissez Faire*. *Pertama*, pemimpin otokratik yaitu dalam mengambil keputusan dipusatkan pada pemimpin. Dalam hal ini pemimpin bebas menentukan kebijakan dan menyusun, mendefinisikan tugas sesuai keinginannya. Pemimpin otokratis diwarnai perintah yang ditujukan kepada bawahan. Seorang pemimpin yang otokratis memerlukan penyesuaian para bawahan, dan mempertimbangkan berbagai keputusan agar yang menjadi paling unggul terhadap bawahan. *Kedua*, pemimpin yang bertipe demoktarik yaitu partisipatif agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan memberdayakan bawahan dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, pemimpin yang bertipe *Laissez Faire* yaitu pemimpin yang memberi kebebasan kepada bawahannya untuk bertindak tanpa diperintahkan. Dalam artian membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya. Pemimpin tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga semua kegiatan dan tanggungjawab dilakukan oleh bawahan sendiri (Harbani Pasolong 2007, 120) .

Teori Kepemimpinan

Kemudian Sholehuddin, berpendapat, paling tidak ada enam teori mengenai kepemimpinan, yaitu : 1) Teori Sifat. Menurut teori ini, menjadi pemimpin yang baik, seseorang harus memiliki sifat-sifat yang lebih daripada yang dipimpinnya. Sifat-sifat kepemimpinan yang secara umum harus dimiliki seperti sikap melindungi, percaya diri, inisiatif, persuasif, komunikatif, energik, kreatif, inovatif dan tanggung jawab. 2) Teori Kharismatis. Teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin seseorang harus mempunyai kharisma (pengaruh) yang sangat besar. 3) Teori Bakat. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena ada bakat didalamnya. 4) Teori Keturunan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena keturunan atau warisan. 5) Teori Sosial. Menurut teori ini, pada dasarnya setiap orang dapat menjadi pemimpin tanpa didasarkan atas bakat dan keturunan, asalkan orang tersebut diberi

kesempatan untuk memimpin. 6) Teori Kelebihan. Menurut teori ini, seseorang menjadi pemimpin karena ia memiliki kelebihan-kelebihan dibanding yang lain. Dalam hal ini, kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin minimal tiga kelebihan, yaitu kelebihan ratio, kelebihan rohaniah dan kelebihan badaniah (Sholehuddin 2008, 45)

Kepala Desa

Kepala desa adalah orang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (1) menyebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan dipilih dalam setiap 6 tahun sekali (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut Widjaja, Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Masyarakat (HAW Widjaja 2003, 27).

Kepemimpinan Kepala Desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa, tetapi seorang Kepala Desa juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud.

Dalam konteks inilah struktur organisasi desa diatur dalam peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Struktur Organisasi pasal 2 diantaranya (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pasal 3 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum,

urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan. Pasal 4 (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota(Hanif Nurcholis 2011, 77) .

Adanya peraturan dan undang-undang baru bertujuan adanya perbaikan dan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan desa. Misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus atas “*Pandangan Masyarakat Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Berpendidikan Tinggi Dan Tidak Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan)*”.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, khususnya di Desa Bumianyar dan Desa Paseseh mewakili kepala desa berpendidikan tinggi serta Desa Tambak Pocok dan Desa Telaga Biru mewakili kepala desa tidak berpendidikan tinggi. Pertimbangan memilih Kecamatan Tanjung Bumi mempunyai arti yang signifikan dalam hal kegiatan operasional di lapangan karena:

1. Dalam hitungan kuantitatif kepala desa di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang berpendidikan tinggi dengan tidak berpendidikan tinggi, berbanding sama yaitu tujuh

berpendidikan tinggi dan tujuh berpendidikan tidak tinggi. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk memilih lokasi tersebut.

2. Penulis adalah orang yang di lahirkan di Kecamatan Tanjung Bumi, khususnya Desa Bumianyar dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat dan penduduk di Kecamatan Tanjung Bumi, sehingga penulis dapat dengan mudah bergaul dan ikut dalam berbagai aktivitas mereka guna mendapat data

Informan penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri dari Masyarakat asli Desa Bumianyar dan Desa Paseseh (laki-laki dan perempuan) mewakili kepala desa berpendidikan tinggi, Masyarakat asli Desa Tambak Pোক and Desa Telaga Biru (laki-laki dan perempuan) mewakili kepala desa tidak berpendidikan tinggi; Tokoh masyarakat; Kyai dan Bapak Camat Kecamatan Tanjung Bumi

Teknik Pengumpulan menggunakan wawancara dan Dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori agar dapat terlihat hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain, kemudian diinterpretasikan melalui teori-teori yang relevan agar dapat dianalisis, sehingga dapat mengumpulkan hasil yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Data dipilih misalnya yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang gaya kepemimpinan kepala desa yang berpendidikan tinggi dengan tidak berpendidikan tinggi serta faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala desa di Kecamatan Tanjung Bumi

Pembahasan

Kepala Desa Kecamatan Tanjungbumi berdasarkan strata pendidikan

Di Kecamatan Tanjungbumi terdapat 14 desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berdasarkan kualifikasi pendidikan syarat menjadi kepala desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (UU No. 6 Tahun 2014, n.d., Psl. 33.d). Berikut adalah data kepala desa menurut jenjang pendidikan dan usia di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Kualifikasi pendidikan kepala desa di Kecamatan Tanjung Bumi ada dua yaitu sarjana

(lulus strata 1) dan bukan sarjana (lulus SMA/ sederajat). Ada tujuh kepala desa yang sarjana yaitu Ahmad Fauzi, SE, dari Desa Paseseh, Hartono, SE dari Desa Bumianyar, Medin SH dari Desa Larangan Timur, Subairi SE dari Desa Bungking, Jayus Salam, SIP dari Desa Aeng Taber, H. Abd Syakur, SH dari Desa Banyusangka dan H. Sundah SH dari Desa Macajah. Dan berdasarkan usia berumur 40 tahun, artinya kepala diatas masuk kategori pemimpin muda.

Sedangkan kepala desa bukan sarjana dengan kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat juga berjumlah 7 orang yaitu Sabbir dari desa Tambak Pocok, Muhammad Asir dari Desa Bandang Daja, Hotibah dari Desa Tagungguh, Ghufon Wibowo dari Desa Planggiran, Kudrotul Hidayat dari Desa Tlangoh, Moh. Ruslan dari Desa Tanjung Bumi dan Moh Zuhdi dari Desa Telaga Biru.

Pandangan Masyarakat Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Sarjana dan bukan Sarjana di Kecamatan Tanjung Bumi

Studi terdahulu tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa menggunakan gaya kepemimpinan karismatik, *liazez faire* dan demokrasi dalam memberikan motivasi aparatnya untuk bekerja lebih baik. Namun dalam penerapannya lebih dominan menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi untuk mendorong aparat desa agar lebih termotivasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa (Solong, Sartika, and Dzulqarnain 2022).

Dalam studi yang lain tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur kepala Desa memiliki gaya kepemimpinan *Laissez Faire* dan menggunakan konsep peranan interpersonal dan informasional untuk membangun partisipasi Masyarakat. kepala Desa memiliki gaya kepemimpinan *Laissez Faire* karena dalam menjalankan tupoksinya sepenuhnya diserahkan kepada staf, tidak melakukan koreksi atas hasil pekerjaan staf. Kepala desa dalam membangun partisipasi masyarakat menggunakan 2 (dua) konsep yaitu peranan interpersonal dan informasional. Pada konteks peran interpersonal Kepala desa belum maksimal dalam memimpin karena kurang inovatif, kaku terhadap aturan. Peran informasional juga belum maksimal karena penyampaian informasi hanya melalui papan informasi desa sehingga masih ada informasi-informasi penting yang tidak tersampaikan ke masyarakat desa (Sari, Rahmaini, and Amantha 2023).

Hal ini berbeda dengan hasil studi Bagus dkk yang menemukan gaya kepemimpinan kepala desa demokratis dalam membangun partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur,

sehingga Masyarakat aktif berpartisipasi dimulai dari pengambilan keputusan dan implementasi kegiatan Pembangunan sehingga pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan Masyarakat setempat (Bagus and Sasmito 2021).

Studi lain tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan yang diterapkan oleh kepala desa yaitu pendekatan Situasional yang dikemukakan oleh Hersey and Blanchard yaitu Telling, Selling, Participating dan Delegating, namun tipe pendekatan paling dominan yang ditunjukkan oleh kepala desa yaitu Telling dan Participating sehingga menjadikan kepemimpinan kepala desa berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu. Kepemimpinan Kepala Desa juga telah menggunakan kepemimpinan Situasional, namun kepemimpinan situasional tersebut belum dapat berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik (Putri, Febriyanti, and Amaliatulwalidain 2022).

Studi Gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana di desa sudah berjalan dengan baik dengan mulai dari tahap pengambilan Keputusan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Dengan gaya kepemimpinan paling dominan demokratis dan terdapat pula gaya kepemimpinan karismatik dan paternalistic. Dan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan kegiatan, gaya kepemimpinan yang dominan juga demokratis selain itu juga terdapat karismatik, paternalistic dan *laissez faire* meskipun tidak dominan (Ramadhani and Suharto 2022).

Melengkapi studi tentang gaya kepemimpinan kepala desa di atas penelitian ini fokus pada gaya kepemimpinan kepala desa yang berlatar belakang Pendidikan sarjana dan bukan sarjana yang dilihat dari perspektif masyarakat yang dipimpinnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat. Untuk itu ada dua kepala desa yang menjadi objek penelitian, mewakili masing-masing kategori. Desa Paseseh dan Desa Bumianyar mewakili kepala desa berpendidikan sarjana dan Desa Telaga Biru dan Tambak Pোক mewakili kepala desa berpendidikan bukan sarjana.

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Sarjana

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No. 6 Tahun 2014, n.d., Pasal 26 (1)).

Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam proses berjalannya pemerintahan desa. Keberhasilan dan kegagalan program pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, yakni seberapa jauh kepala desa merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksana dalam mempengaruhi masyarakat untuk berkembang dan ikut berpartisipasi dalam program yang dijalankan untuk mencapai tujuan (Bagus and Sasmito 2021a).

Menurut Masyarakat Desa Paseseh, gaya kepemimpinan kepala desa paseseh tergolong demokratis tapi juga terkadang otoriter. Dikatakan demokratis karena masyarakat menilai bahwa kepala desa paseseh sudah melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi desa terutama dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Said: “Pelayanan administrasi di desa Paseseh dilakukan dengan sangat bagus, misalnya pembuatan KTP, BPJS, sangat bagus dan cepat karena dibantu sama perangkat desa (Muhammad Sa'id 2019).”

Namun dalam hal lain khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan masih kurang transparan sehingga hanya sebagian masyarakat saja yang tahu. Hal ini dikemukakan oleh Siti To'ah:

“Dalam perencanaan Pembangunan Desa, misalnya proyek pembuatan jalan, Masyarakat tidak diajak dalam proses awal, saat merencanakan Pembangunan. Namun setelah proyek turun baru dirapatkan. Buat jalan seharusnya dimusyawarahkan. Contoh pembuatan jalan di Dusun Kramat Baru. Dalam pengerjaan proyeknya pun, hanya orang-orang pendukung kepala desa pekerjanya (Siti To'ah 2019).”

Menurut masyarakat Desa Bumianyar, gaya kepemimpinan kepala Desa Buminyar cenderung otoriter disebabkan masyarakat menilai kepemimpinan kepala desa dalam perencanaan Pembangunan dan pengelolaan keuangan tidak transparan. Masyarakat tidak diajak terlibat dalam perencanaan Pembangunan. Hanya orang tertentu yang tahu, misalnya tokoh Masyarakat di daerah yang mau di bangun, perangkat desa dan orang pendukung kepala desa. Selain itu masyarakat menilai kepala desa bumianyar kurang silaturahmi dengan warga dan tokoh-tokoh desa setempat. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Abdurrahman:

“Sejauh ini sepertinya tidak banyak masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, begitu juga dengan pengelolaan dana desa hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan di

dalamnya. Di samping itu kepala desa kurang silaturahmi dengan warga dan tokoh desa. Apabila ada pertemuan seperti menghadiri undangan warga biasanya abahnya yang sering mewakili (Abdurrahman 2019).”

Data diatas menemukan gaya kepemimpinan Kepala Desa Bumianyar dianggap cenderung otoriter. Artinya masyarakat menilai Kepala Desa Bumianyar dalam mengambil keputusan lebih banyak dilakukan oleh kepala desa sendiri, staf desa dan masyarakat hanya mengikutinya. Hal ini akhirnya berdampak pada kurang partisipatifnya masyarakat.

Gaya Kepemimpinan kepala desa bukan sarjana

Selanjutnya, tentang gaya kepemimpinan kepala desa yang bukan sarjana yakni kepala Desa Telaga Biru, menurut Masyarakat memiliki gaya kepemimpinan demokratis karena dalam membuat kebijakan/keputusan selalu bermusyawarah dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat desa. Meskipun punya pemikiran sendiri tidak serta merta menerapkannya secara langsung, dipikirkan efek positif dan negatifnya. Sehingga masyarakat menilai kepala desa telaga biru bisa diajak kompromi dan merakyat, jadi semua keluhan rakyat dapat terpenuhi. Hal ini sebagaimana di katakana oleh

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala desa bermusyawarah dengan staff desa. Dan pengelolaan keuangan desa, kepala desa melibatkan staf desa (Hj. Syamsiyah 2019).”

Data diatas menunjukkan gaya kepemimpinan Kepala Desa Telaga Biru adalah demokratis. Artinya masyarakat menilai bahwa kepala desa telaga sudah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa khususnya dalam merancang dan membuat kebijakan strategis seperti pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.

Sedangkan kepala desa yang lain yang bukan sarjana di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan adalah Kepala Desa Tambak Pোক, menurut menurut masyarakatnya Kepala Desa Tambak Pোক demokratis dan namun terkadang otoriter karena dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa selalu mengajak musyawarah orang-orang tertentu saja, orang pendukung dan keluarganya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Muawwin:

“Dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan kepala desa mengajak musyawarah mengumpulkan semua anggota yang terlibat seperti apel BPD bahkan semua terkait dengan pemerintahan seperti kejadian-kejadian (Mu’awwin 2019)”

Namun informan lainnya Ibu Dewi mengatakan:

“Setahu saya otoriter rembukannya hanya dengan orang tertentu terutama dengan kiai didekat rumahnya kalau kata beliau A Kadesnya ikut saja. Sehingga kadesnya tidak punya prinsip. Anak saya pernah ngurus Kartu Keluarga lama sekali, kalau didesa Larangan kayaknya cepat. Coba kamu cari sumber pada orang lain biar berimbang(Dewi Raradaratul Qomariyah 2019).”

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Tambak Pocuk sudah demokratis namun dianggap cenderung otoriter oleh warganya. Masyarakat menilai Kepala Desa Tambak Pocuk kurang melibatkan elemen masyarakat secara lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, sehingga masyarakatnya kurang partisipatif. Yang dilibatkan dalam perencanaan Pembangunan hanya staf yang kebanyakan memiliki hubungan keluarga dan orang-orang yang satu kelompok dengan kepala desa

Dari temuan tentang pandangan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan kepala desa yang sarjana dan bukan sarjana dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kesamaan dengan hasil studi sebelumnya yaitu kepala desa memiliki gaya kepemimpinan demokratis, otoriter dan laissez faire(Harbani Pasolong 2007). Masyarakat memiliki pandangan bahwa gaya kepemimpinan kepala demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang baik dan yang diharapkan oleh Masyarakat. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, memberikan bimbingan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Kepala desa menjadi teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan dinamika pemerintahan dan pembangunan secara partisipatif. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua staf desa dan struktur, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal. Dalam kerjasama yang baik, kekuatan kepemimpinan demokratis terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga secara individu maupun kelompok (Solong, Sartika, and Dzulqarnain 2022).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keempat kepala desa yang menjadi objek penelitian, kepala desa Paseseh, Kepala desa Bumianyar, Kepala desa Telaga biru dan kepala desa tambak pocuk sudah melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam pembangunan masyarakat akan tetapi masih belum semua warga. Partisipasi masyarakat hanya dilakukan oleh warga desa tertentu/kelompok, khususnya kelompok yang merupakan pendukung kepala desa saat pemilihan kepala desa (pilkades). Nuansa politik pilkades masih dirasakan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan desa terpilih.

Selanjutnya masyarakat memiliki pandangan bahwa kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang tidak baik dan tidak disukai oleh masyarakat. Kepemimpinan otoriter identic dengan pimpinan yang egois, karena dalam pengambilan keputusan dilakukan secara subyektif. Sehingga efektifitas kepemimpinan otoriter sangat dikaitkan dengan kekuasaan untuk mengambil tindakan/keputusan yang positif belum tentu dapat tercapai. Sehingga ketaatan para bawahan/masyarakat berkurang dan disiplin kerja pun akan merosot(Solong, Sartika, and Dzulqarnain 2022).

Tentang gaya kepemimpinan kepala desa otoriter ini dalam hal tertentu dilakukan oleh kepala desa Paseseh, Bumianyar dan Tambak Pocuk. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam hal strategis khususnya terkait dengan perencanaan Pembangunan desa, demikian juga dengan pengelolaan keuangan desa. hanya orang-orang tertentu/kelompok tertentu yang dilibatkan, khususnya warga pendukung kepala desa saat pilkades.

Yang terakhir tentang gaya kepemimpinan laissez faire, Masyarakat memandang sebagai gaya kepemimpinan yang tidak baik. Pemimpin membiarkan staf/kelompoknya menjalankan roda pemerintahan desa sendiri. Pemimpin yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh staf desa/bawahan. Kepala desa hanya symbol semata dan tidak memiliki keterampilan teknis. Sehingga kepala desa tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol staf/bawahannya. Tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, dan tidak berdaya menciptakan suasana kerja yang kooperatif(Solong, Sartika, and Dzulqarnain 2022). Gaya kepemimpinan jenis ini tidak di temukan di gaya kepemimpinan kepala desa Pasesh, Bumianyar, Telaga biru dan tambak pocok.

Faktor yang Melatar Belakangi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Steers dalam Rasyid, kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman (M. Rasyid 1992). Hal ini jika dikaitkan dengan gaya kepemimpinan seorang kepala desa memiliki asumsi, kepala desa dengan latar pendidikan sarjana akan memiliki gaya kepemimpinan lebih baik dibandingkan kepala desa dengan latar belakang SMA/ sederajat. Gaya kepemimpinan kepala desa yang dimaksud baik dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan demokratis.

Namun faktanya, berdasarkan pandangan Masyarakat, kepala desa yang dianggap demokratis hanya kepala desa telaga biru dengan latar belakang Pendidikan bukan sarjana (lulusan SMA/ sederajat). Sedangkan kepala desa yang berpendidikan sarjana, Kelada desa paseseh dan bumianyar serta kepala desa tambak pocok berpendidikan bukan sarjana dianggap oleh warganya memiliki gaya kepemimpinan demokratis dan otoriter. Melibatkan partisipasi Masyarakat baik individu maupun kelompok secara luas dalam memberikan layanan administrasi, namun dalam hal perencanaan Pembangunan dan pengelolaan keuangan hanya melibatkan warga/kelompok tertentu yaitu warga pendukungnya saat pilkades.

Menurut teori kepemimpinan sifat efektivitas seorang pemimpin banyak ditentukan oleh sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Teori sifat disebut juga teori genetik, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifatsifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Kepemimpinan diidentifikasi berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Ada karakteristik tertentu seperti sosialisasi dan intelegensi (kecenderungan) yang esensial bagi kepemimpinan yang efektif, yang merupakan kualitas bawaan seseorang. Asumsi dasarnya adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau perangkat tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kepribadian pemimpin itu sendiri (Syahril 2019).

Dengan demikian gaya kepemimpinan Kepala Desa Paseseh, Bumianyar, Telaga Biru dan Tambak Pocok lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang karakter dasar dari masing-masing kepala desa. Sedangkan latar Pendidikan tetap mempengaruhi gaya kepemimpinan, akan tetapi dimungkinkan persentasenya lebih kecil dibandingkan latar belakang karakter yang dibawa sejak lahir dan dibentuk oleh lingkungan sang kepala desa.

Kesimpulan

Pandangan masyarakat tentang gaya kepemimpinan kepala desa yang berpendidikan sarjana dengan bukan sarjana di Kecamatan Tanjung Bumi adalah demokratis dan otoriter. Gaya kepemimpinan kepala desa yang berpendidikan sarjana, desa paseseh dan bumianyar dinilai oleh masyarakatnya demokratis dan otoriter dalam hal tertentu, khususnya perencanaan Pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan kepala desa yang bukan sarjana, desa telaga biru dinilai masyarakatnya demokratis, tapi desa tambak pocok dinilai demokratis dan otoriter. Faktor

yang melatar belakangi gaya kepemimpinan kepala desa adalah sesuai teori sifat kepemimpinan yaitu karakter kepala desa dan lingkungan kepala desa dibesarkan, sedangkan strata Pendidikan tidak cukup mempengaruhi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2019. [3] Maro Rahman, wawancara oleh peneliti, 19 juli 2019.
- Al-Qadri, Muhammad Yudhi. 2024. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA," January. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jmb6z>.
- Bagus, Nanang, and Cahyo Sasmito. 2021a. "PERANAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA." *REFORMASI* 11 (2): 233–43. <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i2.2866>.
- BPS Kabupaten Bangkalan. 2018. *Kecamatan Tanjungbumi Dalam Angka Tahun 2018*.
- Dewi Raradaratul Qomariyah. 2019. wawancara (warga DEsa Tambak Pocok).
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, h.27. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Hj. Syamsiyah. 2019. wawancara (Warga DEsa Telaga Biru).
- Holilah, Holilah. 2014. "FUNGSI DAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA MASARAN, BANYUATES SAMPANG." *JRP (Jurnal Review Politik)* 4 (1): 119–32. <https://doi.org/10.15642/jrp.2014.4.1.119-132>.
- J.A.F. Stoner. 1993. *Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia. Alih Bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- James A.F. Stoner. 1993. "Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen." 1993. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9240>.
- Kartini Kartono. 2013a. "Pemimpin dan Kepemimpinan." *Rajagrafindo Persada* (blog). 2013. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pemimpin-dan-kepemimpinan-apakah-pimpinan-abnormal-itu/>.
- . 2013b. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1976. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- M. Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.65. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- M. Rasyid. 1992. *Pembangunan Kualitas Dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*. Palu: Universitas Tadulako.
- Mu'awwin. 2019. wawancara (warga Desa Tambak Pocuk).
- Muhammad Sa'id. 2019. wawancara (masyarakat Desa Paseseh).
- Pasolong, Harbani. 2019. "Teori Administrasi Publik." Penerbit Alfabeta.
- Putri, Aisyah Septia, Doris Febriyanti, and Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain. 2022. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Sungai Kedukan." *Journal of Social and Policy Issues*, September, 140–45. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i3.11>.
- Ramadhani, Adinda Shauqina, and Didik Gunawan Suharto. 2022. "Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 17 (1): 12–24.
- Sari, Tia Marlinda, Putri Rahmaini, and Goestyari Kurnia Amantha. 2023. "GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PESAWARAN." *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)* 3 (1): 32–36. <https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.898>.
- Sholehuddin. 2008. *Kepemimpinan Pemuda Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Inti Media.
- Siti To'ah. 2019. wawancara (Warga Desa Paseseh).
- Soerjono Soekanto. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Solong, Aras, Sartika, and Dzulqarnain. 2022. "Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintah Desa Di Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone." *Journal of Government Insight* 2 (1): 138–49. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i1.389>.
- Syahril, Sulthon. 2019. "TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4 (02): 208–15.
- Utaminingsih, Alifiulahtin, Wike Wike, and Harsuko Riniwati. 2020. "Feminism-Transformasional: Praksis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Perdesaan Madura." *Dialogia* 18 (2): 395–416. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2439>.
- UU No. 6 Tahun 2014. n.d. "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Accessed January 10, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>.
- Veithzal Rivai. 2006. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.